

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(STUDI DI DESA KUCUR KABUPATEN MALANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**YUVENALIS LAU LAMUSU**

**NIM.2020210092**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

**MALANG**

**2024**

## **RINGKASAN**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini mengkaji pemanfaatan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Kucur. Melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, data tentang program pemberdayaan pemerintah desa dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Kucur telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Masyarakat telah tereduksi dengan baik tentang berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan pertanian, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan rehabilitasi perumahan, melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Faktor krusial lainnya dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah kerja sama dan keselarasan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa. Dukungan dana dari berbagai sumber juga memungkinkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah Desa Kucur terhadap kesejahteraan masyarakat telah terlaksana dengan baik, menunjukkan komitmen dan kemampuan mereka untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Kesejahteraan.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur warganya, termasuk partai politik. Berdasarkan sistem pemerintahan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara hukum dengan batas-batas geografis yang jelas, dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat maupun urusan pemerintahan. Hal ini dicapai melalui hak-hak tradisional, hak leluhur, dan kegiatan masyarakat yang diakui dan dihormati. Desa mendukung kepemimpinan pemerintah pusat secara keseluruhan dan sangat penting untuk pencapaian banyak program dan kegiatan pemerintah. Sebagai unit organisasi pemerintah, desa memainkan peran penting dalam berinteraksi dengan orang-orang dengan latar belakang, minat, dan tuntutan yang beragam. Hal ini terutama berlaku dalam hal pemenuhan tugas yang berkaitan dengan layanan publik. Pelaksanaan operasi pemerintah dan layanan publik yang lancar dan efektif merupakan tanggung jawab pemerintah desa.

Tahap implementasi, yang bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan untuk dilaksanakan, merupakan komponen penting dari kerangka kebijakan. Karena seberapa berhasil atau buruknya tujuan kebijakan dicapai melalui prosedur ini dapat dipengaruhi oleh hasil keseluruhan dari proses kebijakan. Salah satu proyek pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah ilustrasi berbagai cara untuk

pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan mengatasi sejumlah tantangan yang mereka hadapi, termasuk kurangnya sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan potensi ekonomi. Hal ini menuntut pelaksanaan program pemberdayaan yang luas di sejumlah bidang, seperti ekonomi, fasilitas, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat berarti menyingkirkan hambatan untuk maju, seperti buta huruf, kemiskinan, dan keterbelakangan lain yang tak terelakkan, untuk meningkatkan nilai dan martabat masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia dan struktur sosial yang ada disebut pemberdayaan masyarakat. Memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah hidup merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, inisiatif yang mendukung pemberdayaan masyarakat harus memberikan konsep baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sany, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Malang melalui berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tingkat pencapaian metrik kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipengaruhi oleh inisiatif dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait dan perangkat daerah lainnya yang menysasar desa. Salah satu faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah tujuan pembangunan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat menyediakan program kegiatan untuk mewujudkan hal tersebut, dan anggaran desa digunakan untuk mendongkrak potensi masyarakat.

Peneliti mencatat bahwa Pemerintah Desa Kucur telah menerapkan langkah-langkah untuk mendukung usaha kecil, masyarakat tani, dan peternakan, di antara bidang kesejahteraan masyarakat lainnya. Masyarakat dilaporkan telah menerima langkah-langkah ini, dan Pemerintah Desa Kucur tidak diragukan lagi mendapatkan dukungan atas inisiatifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sekretaris Desa Pak Wasiri, 2023).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana **“Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kucur”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kemajuan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur melalui pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat?
2. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur, unsur-unsur apa saja yang membantu dan menghambat pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kucur, maka perlu diketahui bagaimana Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang mendukung atau menghambat terlaksananya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengharapkan hasil-hasil berikut dari penelitiannya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan pemberdayaan masyarakat dan penerapannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur.

2. Manfaat Praktis

Saat pihak terkait menetapkan dan melaksanakan kebijakan desa, temuan penelitian harus menjadi panduan dan sumber daya penilaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, A. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 114.
- Andrianto, W. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Bandung: Mandar Maju*.
- Anwas, O. M. 2013. *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy, M. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Dedeh, M., & Nainggolan, R. R. E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Idris, H. A. 2016. *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Deepublish.
- Irfan, I. M. 2000. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. 2019. Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182.
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazilla, R. U. 2019. *Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Noor, H. F., & Henry, E. P. 2013. *Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Padang: @Kademia.
- Patanga, M. A. A. 2023. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Program Pembderdayaan Bidang Pertanian Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi) (*Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako*).
- Peraturan Bupati Malang Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021-2026



- Sany, U. P. 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1),32-44.
- Soetomo, K. (2014). Upaya Mewujudkannya dalam Persepektif Masyarakat Lokal. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sugiyono, S. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D Cetakan 17. *Bandung: CV Alfabeta*.
- Syachbrani, W. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, S. A. 2021. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.